

Intisari

Industri dengan daya saing tinggi berperan penting dalam perekonomian yang salah satunya dipengaruhi oleh faktor ketersediaan bahan baku yang saat ini masih belum bisa dipenuhi dari domestik sehingga perlu melakukan impor. Pemerintah pada Oktober 2015, mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I untuk mengatasi menurunnya kegiatan perekonomian Indonesia yang salah satunya berisi kebijakan insentif fiskal bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berorientasi ekspor. Kebijakan ini dikenal dengan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah (Fasilitas KITE-IKM) yang diimplementasikan melalui penerbitan PMK-177/2016. Perusahaan akan memperoleh manfaat berupa pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Atas Barang Mewah (PPnBM) atas impor barang dan/atau bahan untuk tujuan ekspor.

Studi bertujuan mengkaji secara empiris mengenai bagaimana pengaruh nilai insentif fiskal Fasilitas KITE-IKM terhadap ekspor perusahaan dengan menggunakan beberapa model penelitian pada observasi bulanan 2015-2021. Hasil analisis menunjukkan bahwa ekspor perusahaan dengan Fasilitas KITE-IKM lebih tinggi 86% dibandingkan perusahaan tanpa Fasilitas (model *Differences in Differences*/DiD). Pemanfaatan nilai insentif fiskal satu periode sebelumnya yang meningkat 1% maka ekspor perusahaan akan meningkat 0.01% (model *Lag*) dan pemanfaatan nilai insentif fiskal oleh perusahaan yang meningkat 1% maka ekspor perusahaan meningkat sebesar 0.08% (model IV). Penggunaan *Lag* diakomodasi periode relaksasi ekspor pada PMK-177/2016, sehingga diperlukan langkah percepatan realisasi dari perusahaan dan dukungan pemerintah dalam mengatasi kendala ekspor tersebut. Pemerintah perlu mendorong Fasilitas ini tidak hanya berpusat di Pulau Jawa-Bali, namun juga daerah lainnya dalam mendukung IKM yang berorientasi ekspor serta perluasan manfaat Fasilitas berupa penambahan tidak dipungutnya PPh Ps. 21 Impor dengan sebelumnya mempertimbangkan analisis biaya dan manfaatnya.

Kata Kunci: Fasilitas KITE-IKM, Insentif Fiskal, DiD, *Lag*, IV, Ekspor.

Abstract

Industries with high competitiveness play an important role in the economy, one of which is influenced by the availability of raw materials, which currently cannot be fulfilled domestically, so they need to import. Government in October 2015, issued the Economic Policy Package Volume I to address the decline in Indonesia's economic activity, one of which contained a fiscal incentive policy for export-oriented Small and Medium Industries (IKM). This policy is known as the Import Facility for Small and Medium Industry Export Destinations (KITE-IKM Facility) which was implemented through the issuance of PMK-177/2016. The company will receive benefits in the form of exemption from Import Duty and non-collection of Value Added Tax (PPN) and Tax on Luxury Goods (PPnBM) on imported goods and/or materials for export purposes.

The study aims to examine empirically the effect of the fiscal incentive value of the KITE-IKM Facility on the company's exports by using several research models on monthly observations of 2015-2021. The results of the analysis show that the exports of companies with KITE-IKM facilities are 86% higher than companies without facilities (Differences in Differences/DiD model). The use of the fiscal incentive value of the previous period which increased by 1%, the company's exports would increase by 0.01% (Lag model) and the use of the fiscal incentive value by the company which increased by 1% would increase the company's exports by 0.08% (model IV). The use of lag is accommodated in the export relaxation period in PMK-177/2016, so steps are needed to accelerate the realization of the company and support the government in overcoming these export constraints. The government needs to encourage this facility not only to be centered on the island of Java-Bali but also in other regions in supporting export-oriented SMEs and to expand the benefits of the facility in the form of additional non-collection of PPh Ps. 21 Import by considering the cost and benefit analysis beforehand.

Keywords: KITE-IKM facilities, Fiscal Incentives, DiD, Lag , IV, Export.